

Lampiran LOA Publikasi



CAHAYA ILMU BANGSA INSTITUTE

SK KEMENKUMHAM AHU-0018912-AH.01.14

Biro Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Perum Puri Kartika Asri Blok 2 A2 Malang

e-mail : admin@cahayailmubangsa.institute

No : 2025/CIB/LOA
 Lampiran : Link Terbitan dan PDF Terbit
 Subject : Letter of Acceptance

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini, kami menerangkan bahwa artikel dengan keterangan naskah berikut

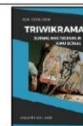
Judul	:	PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM EMISSION REDUCTION IN CITIES-SOLID WASTE MANAGEMENT (ERIC-SWM) DI TPA GRIYO MULYO KABUPATEN SIDOARJO
Author	:	Daffa Syafaadin naufal, Ghulam Maulana Ilman, Adi Soesiantoro
Instansi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Korespondensi	:	Daffanaufal2805@gmail.com
Jurnal	:	Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume	:	Volume 11 No 9, 2025

berstatus ACCEPTED untuk dipublish. Keputusan ini dibuat sebagai tanda bahwa naskah yang bersangkutan telah lolos plagiarism checker. Dan LoA ini dibuat sebagai bukti bahwa author telah menyelesaikan APC yang telah ditetapkan oleh pengelola jurnal. LOA Berlaku jika dilengkapi link dan pdf publish. Hubungi kami di admin_jurnal@cahayailmubangsa.institute jika ada pertanyaan lebih lanjut, terima kasih.

Malang 11 Des 2025



Danang Priambodo, PhD
 Director



Seiring berjalannya proses seleksi, pemerintah pusat bersama pihak pendamping teknis dari Jerman—khususnya melalui dukungan KfW Development Bank dan konsultan perencana Fichtner—melakukan penyusunan dokumen administratif serta perencanaan teknis yang menjadi syarat utama pelaksanaan program. Proses administrasi ini mencakup penyusunan studi kelayakan, kajian lingkungan, desain teknis, hingga kelengkapan dokumen kerja sama yang diperlukan dalam skema Public Private Partnership (PPP). Seluruh tahapan tersebut berkembang secara bertahap dari tahun 2013 hingga akhirnya menghasilkan daftar kandidat lokasi yang siap diterapkan program. Hingga pada tahun 2018, setelah melalui proses evaluasi yang panjang dan komprehensif, TPA Griyo Mulyo di Kabupaten Sidoarjo resmi ditetapkan sebagai salah satu penerima Program ERIC-SWM bersama tiga TPA lain di Jambi, Jombang, dan Malang. Penetapan ini dilakukan karena TPA Griyo Mulyo dinilai memenuhi kriteria teknis dan nonteknis, termasuk urgensi peningkatan kualitas pengelolaan sampah akibat tingginya timbunan harian serta kondisi TPA yang hampir mencapai batas kapasitas.

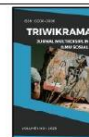
Setelah penetapan tersebut, proses pembangunan infrastruktur ERIC-SWM di TPA Griyo Mulyo langsung dimulai pada tahun yang sama. Pembangunan ini meliputi pengadaan fasilitas pemilahan (shorting), pengomposan (composting), instalasi pengolahan air lindi, sistem penangkapan gas metana, serta penerapan sanitary landfill yang sesuai standar lingkungan. Seluruh pembangunan berlangsung selama dua tahun dan resmi diselesaikan pada tahun 2020, menjadikan TPA Griyo Mulyo sebagai salah satu TPA modern yang mengedepankan efisiensi pengolahan sampah sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dengan demikian, perjalanan Program ERIC-SWM sejak 2013 hingga selesai dibangun pada 2020 menggambarkan adanya komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional, berkelanjutan, dan sesuai standar lingkungan hidup. Program ini juga menjadi contoh nyata implementasi kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) dalam sektor lingkungan dan pengelolaan sampah. Jika kamu ingin, paragraf ini bisa disesuaikan menjadi bagian latar belakang, atau dijadikan subbab khusus sejarah Program ERIC-SWM, tinggal beri tahu saja

Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Kemitraan merupakan kesepakatan formal antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan (Anwar, 2020). Dalam konteks pembangunan, kemitraan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, menyerap tenaga kerja, serta mendukung pembangunan wilayah (Hafsah, 2003). Pada sektor publik, kemitraan pemerintah-swasta (Public-Private Partnership) dipahami sebagai perjanjian jangka panjang antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan aset atau layanan publik, di mana pihak swasta menanggung tanggung jawab pengelolaan, risiko, serta memperoleh imbalan berdasarkan kinerja (IIGF, 2015).

Menurut Anderson dalam Ibrahim (2006), kemitraan memiliki ciri-ciri: (1) terbentuk karena keinginan bersama, bukan paksaan hukum; (2) melibatkan unsur modal, tenaga kerja, atau keduanya; dan (3) umumnya terdiri atas perusahaan dan mitra kerja sama. Dalam praktik KPS, pihak swasta dapat terlibat dalam beberapa fungsi, yaitu desain, konstruksi atau rehabilitasi, pembiayaan, pemeliharaan, dan pengoperasian aset infrastruktur (IIGF, 2015). Kemitraan membuka peluang sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah menyediakan regulasi, kewenangan, dan dukungan kelembagaan, sedangkan pihak swasta berkontribusi melalui sumber daya dan



pembiayaan (Firmanzah, 2018). North (2004) menambahkan bahwa kemitraan dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, menyediakan solusi terpadu lintas sektor, menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan inklusif.

Public Private Paertnership

Public Private Partnership (PPP) muncul karena meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan layanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah akibat keterbatasan anggaran. Melalui PPP, pihak swasta dapat menyediakan pembiayaan, keahlian teknis, manajemen, serta inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. PPP tidak hanya bertujuan mengatasi kekurangan dana pemerintah, tetapi juga untuk menghadirkan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan. Ciri utama PPP meliputi pembagian risiko, pembagian keterampilan, penggunaan aset bersama, serta pembagian sumber daya dan manfaat. Model ini menempatkan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, sehingga mendorong tercapainya value for money, efisiensi biaya proyek, dan kualitas layanan yang lebih baik (Susanti & Runiawati, 2021). Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas menjadi dasar dalam penyelenggaraan PPP, sebagaimana diuraikan oleh Keban (2009). Keberhasilan PPP juga ditentukan oleh komitmen, proses negosiasi yang seimbang, pengawasan yang kuat, serta kesetaraan peran antara sektor publik dan swasta (Leonhardt, 2007).

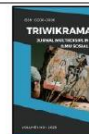
Dalam pelaksanaannya, PPP dipengaruhi oleh aspek regulasi, organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa proyek berjalan sesuai tujuan (Matos & Gonçalves, 2020). Konsep hollow state memperkuat gambaran kemitraan bahwa sebagian layanan publik diserahkan kepada pihak ketiga, sementara pemerintah berperan sebagai pengendali utama melalui mekanisme pembiayaan, kontrak, dan evaluasi yang terintegrasi. Struktur kemitraan yang baik menuntut pembagian peran yang jelas, koordinasi yang kuat, serta insentif yang tepat sehingga sektor swasta terdorong memberikan kinerja terbaik secara berkelanjutan. Dengan demikian, PPP menjadi strategi penting bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik secara efisien dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kebermanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Collaborative Governance

Pelaksanaan Program ERIC-SWM di TPA Griyo Mulyo didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengelolaan sampah secara komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir. Program ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah dan mitra internasional untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan. Dalam implementasinya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan KfW Jerman untuk menghadirkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern melalui empat komponen utama: shorting, composting, pengolahan air lindi, dan penerapan sanitary landfill. Sebelum program ini berjalan, TPA Griyo Mulyo masih menggunakan sistem open dumping yang menimbulkan pencemaran udara, bau, dan risiko lingkungan. Melalui intervensi ERIC-SWM, sistem tersebut ditingkatkan menjadi sanitary landfill yang dilengkapi jaringan gas metana, saluran drainase, dan fasilitas pengolahan lindi.

*Corresponding author

E-mail addresses: daffanaufal2805@gmail.com



2. METODE

Penelitian merupakan peran yang sangat penting dalam proses ilmiah. Metodologi penelitian dipahami sebagai seperangkat langkah, aturan, dan prosedur yang digunakan peneliti dalam suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena itu, metodologi berfungsi sebagai pedoman utama yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Melalui metode penelitian, peneliti dapat memperoleh data yang valid untuk kemudian dianalisis sesuai pendekatan yang dipilih, sehingga mampu menemukan jawaban maupun solusi atas permasalahan yang diteliti. (sitasi sama dengan jenis penelitian). Kegiatan penelitian juga merupakan upaya untuk memperoleh data dengan manfaat tertentu. Disebut ilmiah karena prosesnya berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional (dapat diterima oleh akal), empiris (dapat dibuktikan melalui pengamatan), serta sistematis (dilakukan melalui tahapan yang logis dan teratur) (Sulistiyawati, 2023).

Jenis dan Sumber Data

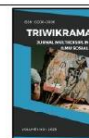
pada sudut pandang subjek, proses, serta makna yang muncul dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, teori-teori digunakan sebagai landasan atau acuan yang berfungsi sebagai payung konseptual sekaligus pendukung agar temuan sesuai dengan realitas di lapangan. Teori juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian serta memperkuat pembahasan. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk menyusun pemahaman yang menyeluruh dan kompleks, menganalisis data berupa kata-kata, opini, maupun informasi dari informan dalam kondisi yang alami (natural setting), lalu menyajikannya dalam bentuk laporan. Laporan ini menggambarkan data apa adanya berdasarkan hasil yang sudah diuji keabsahannya serta memenuhi kriteria kredibilitas. Jenis penelitian yang temuannya tidak didapat melalui prosedur statistik, melainkan berfokus pada upaya peneliti dalam memahami serta menafsirkan makna dari suatu peristiwa, interaksi, maupun perilaku subjek dalam konteks tertentu sesuai dengan sudut pandang penelitiannya (Fiantika et al., 2022).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam penelitian, karena kualitas hasil penelitian bergantung pada ketepatan teknik yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara alami melalui sumber primer seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Hardani et al., 2020). Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat objek penelitian secara sistematis, di mana peneliti turun langsung ke Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sebagai lokasi TPA Griyo Mulyo yang menjadi fokus Program ERIC-SWM. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab dengan berbagai pihak terkait, seperti UPTD TPA Griyo Mulyo, Balai Penataan Bangunan, DLHK, serta masyarakat sekitar. Dokumentasi melengkapi dua teknik sebelumnya melalui pengumpulan data dari dokumen resmi maupun pribadi, seperti foto, catatan, kebijakan, dan arsip, yang berfungsi memperkuat kredibilitas temuan.

Analisi Data

Adapun prosedur penelitian *grounded theory* yang diadaptasi dari Strauss & Corbin menggunakan teknik analisis data yang meliputi, *open coding*, *axial coding*, *selective coding* (Nasution, 2023). Pada tahap *open coding*, peneliti mengidentifikasi dan membuat berbagai kategori berdasarkan informasi terkait fenomena yang diteliti. Setelah kategori-kategori tersebut dibentuk, peneliti menyusun kategori tersebut ke dalam bentuk lain (misalnya, mode visual) dengan menggunakan paradigma pengkodean untuk menemukan data-data yang relevan dengan



pertanyaan penelitian. Tahapan ini dikenal sebagai *axial coding*. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu *selective coding*, peneliti merangkai cerita berdasarkan hubungan antar kategori yang telah dibuat dan mengembangkan hipotesis untuk menjelaskan keterkaitan antar kategori tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pendapatan TPA dengan memperluas skema layanan berbasis retribusi. Selama ini pemasukan TPA masih terbatas pada pembayaran retribusi dari pihak tertentu, sehingga belum mampu menutup biaya operasional. Pemerintah dapat memperluas objek retribusi, misalnya dengan menerapkan tarif layanan bagi industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, serta pengelola kawasan besar yang menghasilkan volume sampah tinggi. Tarif ini tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan bayar dan diatur melalui Perda agar memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan peningkatan cakupan retribusi, TPA berpotensi menambah pemasukan secara signifikan. TPA Griyo Mulyo juga dapat meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah. Sampah yang masuk ke TPA sebenarnya memiliki nilai jual jika dikelola dengan pendekatan ekonomi sirkular. Pemerintah dapat mengembangkan unit bisnis seperti penjualan kompos hasil pengolahan sampah organik, pemanfaatan material daur ulang, hingga kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sampah bernilai ekonomis tinggi. Pendekatan ini bukan hanya menambah pendapatan, tetapi juga mengurangi volume sampah yang harus ditimbun.

pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama investasi atau public-private partnership (PPP) untuk mendukung pembiayaan operasional TPA. Skema kemitraan ini memungkinkan adanya dukungan modal maupun inovasi dari pihak swasta, seperti pengembangan teknologi waste-to-energy, pengolahan RDF, atau peningkatan fasilitas TPA. Dengan demikian, sebagian beban biaya dapat dialihkan melalui pembiayaan kolaboratif, sehingga ketergantungan terhadap APBN berkurang. diperlukan evaluasi terhadap efisiensi biaya operasional TPA. Walaupun biaya operasional besar, bukan berarti seluruhnya tidak dapat ditekan. Pemerintah dapat melakukan audit internal untuk melihat komponen biaya yang masih bisa dihemat, seperti penggunaan bahan bakar, perawatan alat, manajemen armada, hingga pengaturan shift pegawai. Optimalisasi proses kerja yang lebih efisien dapat menurunkan beban biaya tahunan.

keberlanjutan operasional TPA Griyo Mulyo tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi pendapatan jangka panjang dan efisiensi biaya secara bersamaan. Pendekatan ini akan membuat TPA lebih mandiri secara finansial, sekaligus mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah yang modern, terstruktur, dan ramah lingkungan.

PEMBAHASAN

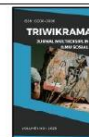
Dengan Menggunakan Teori Matos and Gonsalves (2020)

Dasar Hukum Kerja Sama

Kerja sama Pemerintah Indonesia-KfW dalam Program ERIC-SWM memiliki dasar hukum yang kuat melalui PP No. 10/2011 tentang Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta

*Corresponding author

E-mail addresses: daffanaufal2805@gmail.com



Pasal 27 UU No. 18/2008. Dana dari KfW diterima pemerintah pusat sebagai pinjaman lalu dialokasikan kepada daerah dalam bentuk hibah, sehingga tidak menimbulkan beban utang. Seluruh proses pembangunan, penyaluran dana, tender, dan kontrak diatur dalam dokumen perjanjian resmi, sehingga pelaksanaan program berjalan legal, terstruktur, dan akuntabel.

Analisis Tahap Awal Proyek

Tahap awal Program ERIC dimulai dari penawaran proyek oleh pusat, penyusunan readiness criteria, verifikasi kesiapan lokasi, hingga penyusunan studi kelayakan. TPA Griyo Mulyo memenuhi semua syarat, termasuk AMDAL yang disahkan melalui Keputusan Bupati. Proses ini sesuai teori Matos & Gonsalves, karena readiness criteria menunjukkan kesiapan sumber daya (material planning) dan studi kelayakan memenuhi aspek technical feasibility sesuai standar Bappenas.

Mekanisme Faktor Organisasi

Program ERIC tidak membentuk konsorsium, karena skema yang digunakan berupa loan sehingga operasional sepenuhnya dikelola pemerintah daerah. Struktur organisasi proyek disusun oleh pemerintah dengan pembagian tugas jelas sesuai pedoman konsultan. Pemilihan staf dilakukan melalui seleksi teknis dan pelibatan warga lokal untuk pekerjaan operasional. Seluruh staf mengikuti pelatihan sebelum commissioning, mencerminkan prinsip organizational structure & human resource allocation menurut Matos & Gonsalves.

Mekanisme Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder

Stakeholder yang terlibat meliputi Pemerintah Kabupaten, KfW, PT PP, BLUD DLHK, dan BPKAD. PT PP mendampingi hingga commissioning, sementara DLHK dan BPKAD menangani administrasi dan keuangan. Masyarakat terlibat melalui TPS3R/TPST dan pendekatan informal UPTD, sehingga keluhan dan aspirasi tersampaikan. Pola ini sesuai indikator stakeholder consideration dan public participation menurut Matos & Gonsalves.

Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas

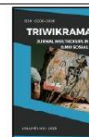
Transparansi dilakukan melalui aplikasi SIPASS yang menampilkan data operasional TPA secara real-time. Akuntabilitas dijalankan melalui pencatatan harian, laporan bulanan ke DLHK, laporan tahunan, serta audit oleh BPK. Sistem ini memenuhi prinsip transparency & accountability dalam PPP, karena data mudah diverifikasi dan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme Keterjangkauan Dana

Dana ERIC berasal dari loan KfW sekitar Rp380 miliar yang disalurkan dalam bentuk fasilitas dan peralatan, bukan tunai. Rinciannya hanya dapat diakses melalui prosedur Kemenkeu. Pendapatan TPA berasal dari retribusi BLUD sesuai Perda No. 1/2024, menghasilkan sekitar Rp13 miliar per tahun, namun belum mencukupi biaya operasional Rp40 miliar sehingga memerlukan dukungan APBN. Mekanisme ini sesuai indikator financial affordability menurut Matos & Gonsalves.

Mekanisme Pengawasan

Dana ERIC berasal dari loan KfW sekitar Rp380 miliar yang disalurkan dalam bentuk fasilitas dan peralatan, bukan tunai. Rinciannya hanya dapat diakses melalui prosedur Kemenkeu. Pendapatan TPA berasal dari retribusi BLUD sesuai Perda No. 1/2024, menghasilkan sekitar Rp13 miliar per tahun, namun belum mencukupi biaya operasional Rp40 miliar sehingga memerlukan dukungan APBN. Mekanisme ini sesuai indikator financial affordability menurut Matos & Gonsalves.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program ERIC-SWM di TPA Griyo Mulyo terbukti berjalan efektif karena didukung oleh struktur operasional yang kuat, pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah dan KfW, serta pelatihan teknis yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan program juga diperkuat oleh keterlibatan aktif masyarakat, sistem transparansi melalui SIPASS, serta mekanisme akuntabilitas dan audit yang rutin. Pendanaan yang terstruktur melalui hibah KfW dan retribusi TPA, ditambah dengan pengawasan berlapis dari DLHK dan kementerian terkait, memastikan program berjalan sesuai target. Seluruh proses ini berlandaskan regulasi nasional, sehingga pelaksanaan program legal, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan sampah yang modern dan bertanggung jawab.

Saran

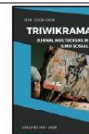
Pendapatan TPA Griyo Mulyo yang hanya sekitar Rp13 miliar per tahun belum mampu menutupi biaya operasional lebih dari Rp40 miliar, sehingga ketergantungan pada APBN masih tinggi. Untuk mengatasinya, pengelolaan keuangan perlu diperkuat melalui optimalisasi retribusi, peninjauan tarif bagi penghasil sampah besar, serta peningkatan kepatuhan pembayaran. Diversifikasi pendapatan juga penting, seperti penjualan kompos, biogas, atau hasil daur ulang. Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus terus dijaga agar operasional lebih efisien dan TPA dapat menuju pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Anwar, M. (2020). Model Kemitraan Bisnis Antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (1st ed.). Sasanti Institute.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. .
- Azwar, S. (2013). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
- Azzahra, A. S. A., Herawati, A. R., & Purnaweni, H. (2024). Public Private Partnership Dalam Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4).
- Brin. (2024, July 26). 11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik. <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-Juta-Ton-Sampah-Di-Indonesia-Tidak-Terkelola-Dengan-Baik>. <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication.
- Danim, S. (2002). *MENJADI PENELITI KUALITATIF*. Pustaka Setia.
- Dewi, D. A. P., & Hertati, D. (2025). Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7).

*Corresponding author

E-mail addresses: daffanaufal2805@gmail.com



- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2015, February 26). JERMAN DANAI PEMBANGUNAN TIGA TPA DI JATIM. Kominfo.
- Ediyono, R. P. (2017). Pemanfaatan Limbah Kulit Buah-Buahan Sebagai Bahan Baku Pembuatan Pupuk Organik Cair.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI .
- Firmanzah. (2018). Studi Kasus Kemitraan: Perspektif Bisnis dan Sosial.
- Hafsah, M. J. (2003). Kemitraan Usaha (3rd ed.). PT Pustaka Sinar Harapan,.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Fajar Arwadi. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hasit, R., & As'ari, H. (2021). Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 105-113. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13905>
- IIGF. (2015). Kemitraan Pemerintah Swasta Panduan Referensi Versi 2.0. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Kemitraan Swasta dan Pemerintah (. Muhammad Irawati, Erna Taufiq, Ed.). Perdana, Reghi .